

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Hukum Internasional adalah sekumpulan aturan yang mengatur hubungan antar negara. Hukum internasional juga dapat didefinisikan sebagai hukum yang mengatur entitas berskala internasional. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara, antara negara dengan negara, dan negara dengan subjek hukum lain, bukan negara atau subjek bukan negara satu sama lain. Subjek hukum internasional sendiri adalah segala hal yang berdasarkan hukum dapat memiliki hak serta kewajiban, dan memiliki kewenangan untuk melakukan hubungan hukum maupun bertindak menurut ketentuan hukum internasional yang ada dan berlaku (Kusumaatmadja, 2016:67).

Dalam perannya, hukum internasional berperan untuk tercapainya sebuah keadilan. Dimana, dengan adanya hukum internasional, setiap orang dapat menerima apa yang sudah menjadi hak miliknya. Pada awal abad ke 20, segelintir kerajaan Eropa menguasai sebagian besar dunia, namun negara-negara terjajah di Afrika, Asia, Karibia, dan di tempat lain berpendapat bahwa mereka berhak menentukan masa depan politik mereka sendiri. Seruan mereka untuk menentukan nasib sendiri menjadi seruan untuk kemerdekaan. Pecahnya kerajaan-kerajaan sepanjang abad kedua puluh merupakan sebuah proses yang dikenal sebagai dekolonisasi yang menghasilkan ledakan negara negara baru, dan menciptakan peta dunia seperti yang kita kenal sekarang (Sterio, 2018).

Hak untuk menentukan nasib sendiri (*The Rights of Self Determination*) muncul ke permukaan seiring dengan meningkatnya tuntutan atas pemerintahan yang didasarkan pada kedaulatan rakyat, yang dimulai dengan Deklarasi Kemerdekaan Amerika (1776), dan Revolusi Perancis (1789) (Raic, 2002:173). Ungkapan *The Right of Self-Determination* sering dipahami sebagai hak sebuah kelompok atau “bangsa” untuk menentukan nasib sendiri yang pada titik ekstrim sering dikaitkan dengan konteks perjuangan untuk mencapai kemerdekaan atau kelahiran sebuah negara dengan memisahkan diri. James Anaya membedakan antara mode penentuan nasib sendiri yang berbeda, dengan melihat dua model spesifik:

1. Penentuan nasib sendiri yang konstitutif, “dimana orang memutuskan status masa depan mereka, memilih atau menolak pemisahan diri, seperti yang telah dilakukan oleh Skotlandia, Sudan Selatan dalam referendum kemerdekaan seperti yang terjadi di Skotlandia, Sudan Selatan dan Montenegro belakangan ini (dua diantara negara tersebut berakhir mendapatkan kemerdekaan).
2. Penentuan nasib sendiri yang sedang berlangsung’, “dimana suatu kelompok menjalankan tingkat kontrol politik atas rakyat dan/atau wilayahnya sendiri, meskipun tidak harus melalui kemerdekaan penuh seperti yang dilakukan oleh negara-negara konstituen Inggris, atau federal subjek negara federal seperti Rusia atau Amerika Serikat” (Anaya, 2004:99).

Perjuangan Catalunya untuk mendapatkan kemerdekaan telah menjadi perjuangan yang berat bagi penduduk Catalunya. Dimulai pada 11 September 1714, ketika sukseksi Spanyol saat berhasil menaklukkan wilayah Catalunya. Sebelum abad ke XVIII Kerajaan Aragon ada, terdapat perbatasan yang terdiri dari Kepulauan Balearic, Valencia, Catalunya, dan Aragon. Namun pada tahun 1701 ketika sukseksi Spanyol dimulai, perbatasan ini mulai hilang saat orang Spanyol datang untuk menaklukkan wilayah mereka. Pada tahun 1713, Kampanye Catalunya dimulai dengan tujuan mengambil kembali wilayah Catalunya, yang

mengakibatkan pengepungan Barcelona yang terkenal pada tanggal 11 September 1714 (Canetti, 2021).

Pertempuran sengit antara pasukan Borbonic yang berjuang untuk Monarki, dan tentara Catalan yang berperang untuk para tentara yang telah terdesentralisasi setelah kejatuhan Kerajaan Aragon. Dengan berakhirnya pertarungan ini, Barcelona menyerah dan perlawanan terakhir yang tersisa di Semenanjung Iberik juga tidak ada lagi. Tahun berikutnya, Spanyol juga mengambil kepulauan Balearic dan mengakhiri suksesi melalui perjanjian *Utrecht dan Rastatt*. Namun hingga saat ini, masyarakat Catalunya selalu menginginkan kemerdekaan kembali kepada mereka (Arizona State University, 2017).

Berbagai alasan menyelimuti keinginan Catalunya untuk memisahkan diri dari Spanyol, antara lain :

1. Sistem fiskal Spanyol yang menghambat pembangunan serta kemajuan Catalunya melalui tarif pajak yang sangat tinggi dengan pengembalian yang kecil, maka dari itu, banyak orang Catalunya percaya bahwa tanpa Spanyol mereka akan jauh lebih makmur karena dapat mempertahankan kekayaan mereka untuk diinvestasikan kembali ke kota.
2. Catalunya menginginkan Otonomi yang lebih besar.
3. Spanyol yang merupakan negara berbentuk Monarki Parlemen dimana Catalunya selalu menginginkan sebuah negara berbentuk republik dalam bentuk desentralisasi.
4. Rakyat Catalunya merasa bahwa mereka sudah memiliki segalanya untuk dapat membentuk sebuah negara, antara lain Bahasa mereka

sendiri, budaya mereka sendiri yang sudah ada lebih dari 800 tahun lamanya.

Jika merujuk dari Konvensi Montevideo tahun 1933, terdapat syarat- syarat yang harus dimiliki suatu bangsa sebagai bagian dari dunia internasional, unsur tersebut ada yang bersifat mutlak atau konstitutif dan tambahan atau deklaratif. Unsur konstitutif merupakan syarat mutlak yang harus ada, jika tidak, maka suatu negara tidak akan ada. Unsur dari negara menurut Konvensi Montevideo tahun 1933 yaitu :

1. Rakyat (*Permanent Population*).
2. Wilayah (*A Defined Territory*).
3. Pemerintah (*A Government*).
4. Kemampuan. Mengadakan hubungan dengan negara lain (*A Capacity to enter into relations with other states*).

Dan terdapat dua macam pengakuan yang dibutuhkan dari negara lain, yakni pengakuan *de facto*, dan pengakuan *de jure*. Berdasarkan itu, maka Catalunya sendiri memenuhi semua unsur – unsur yang terdapat pada Konvensi Montevideo 1933 untuk membentuk suatu negara. Dalam sejarahnya, Skotlandia merupakan negara yang sedikit banyak memiliki kesamaan dengan Catalunya tentang bagaimana suatu wilayah ingin memisahkan diri melalui. Berbeda dengan di Skotlandia, yang secara sah melakukan referendum mereka pada 2014 silam dengan hasil suara menyatakan mereka tetap menjadi bagian dari Inggris karena 55% suara menolak pemisahan diri. Pemerintah pusat Spanyol tidak menyetujui diadakannya referendum dan justru menyatakan referendum Catalunya merupakan langkah ilegal (Hill, 2017).

Gerakan-gerakan serta keinginan kemerdekaan terus berlangsung setiap tahunnya, dan sejak tahun 2008, pergerakan menuju kemerdekaan Catalunya sudah mendapatkan momentum. Hal ini merupakan imbas dari krisis keuangan global pada tahun 2008. Gerakan – gerakan ini mengakar ke seluruh penjuru Catalunya dan memobilisasi jutaan orang Catalunya setiap tahunnya menuntut referendum pemisahan diri dari Spanyol. Gerakan-gerakan ini terus berkembang terutama di kalangan penduduk kota dan pada kalangan yang lebih muda dan berpendidikan. Menanggapi dukungan yang sedang berkembang ini, Pemerintah Catalunya memutuskan untuk secara sepihak menyelenggarakan referendum kemerdekaan secara konstitutif tepat pada tanggal 1 Oktober 2017, sebelumnya pada 2014 referendum serupa juga pernah dilaksanakan dimana sekitar 80% masyarakat Catalunya memberikan suara untuk pemisahan diri, Namun pemerintah Spanyol menyatakan pemungutan suara tersebut ilegal dan turut mengambil tindakan hukum terhadap politisi dan aktivis Catalunya yang terlibat dalam referendum tersebut (Villa, 2022).

Adapun data yang dihasilkan sehari setelah referendum yang dilakukan pada 1 Oktober 2017 menyebutkan, bahwa 2.044.038 suara atau 92,01 persen menginginkan kemerdekaan Catalunya. 7,99 persen suara atau 177.547 suara tetap ingin bersama sedangkan 2,83 persen atau 64.632 suara dinyatakan tidak sah. Berdasarkan undang-undang yang disetujui oleh parlemen Catalunya, hasil dari referendum seharusnya diumumkan dan dilaksanakan dua hari setelah pemungutan suara. Pada 3 Oktober, gerakan pro-kemerdekaan mengorganisir pemogokan umum terbesar dalam sejarah Catalunya dan Spanyol untuk mendeklarasikan kemerdekaan melalui hasil referendum yang telah dilakukan. Para pendukung

kemerdekaan bersorak di penjuru jalanan Barcelona dan di setiap kota di Catalunya. Momen ini merupakan saat dimana seharusnya para “Staf Umum” Pemerintah Catalunya selanjutnya untuk mengambil sikap agar mendeklarasikan kemenangan mereka atas referendum yang sudah diadakan 2 hari sebelumnya. Namun faktanya tidak ada peristiwa yang terjadi. Tidak ada seorangpun mendeklarasikan kemerdekaan Catalunya pada 3 Oktober 2017 (Vila, 2022).

Di tengah momen krusial ini, otoritas Spanyol memanfaatkan momentum gagal dari para Pemimpin pro-kemerdekaan tanpa keraguan sedikitpun. Raja Philip VI dalam pidato yang disampaikan di malam yang sama menuduh pemerintah Catalunya “tidak setia kepada negara” dan telah melanggar Konstitusi Spanyol tahun 1978 yang mengacu kepada “Kesatuan Bangsa Spanyol Yang Tak Terpisahkan” karena meminta kekuasaan negara untuk menerapkan kembali tatanan konstitusional di Catalunya. Jaksa Agung Jose Manuel Maza menambahkan akan melakukan tuntutan pidana terhadap pejabat Catalunya yang bertanggung jawab untuk menjadwalkan referendum 1 Oktober. Para pejabat dapat didakwa, atas ketidaktaatan, penyalahgunaan kekuasaan, dan penggelapan. Selain melanggar Konstitusi Spanyol, Hal ini juga diperkuat dengan kemerdekaan Catalunya yang tidak mendapatkan pengakuan dari hampir semua negara berdaulat PBB. Namun, negara-negara non anggota PBB yang diakui sebagai Abkhazia dan Ossetia Selatan mengklaim bahwa mereka bersedia menawarkan pengakuan formal jika mereka menerima permintaan untuk melakukannya dari pemerintah Catalunya (Vila, 2022).

Terlepas dari situasi politik yang sedang berlangsung, para aktivis pro-kemerdekaan tetap percaya diri dengan kepemimpinan mereka. Namun setelah

pidato Presiden Puigdemont pada tanggal 10 Oktober 2017, kepercayaan diri mereka runtuh. Pemerintah Catalunya di wakili oleh Presiden Catalunya Carles Puigdemont di depan Parlemen di Barcelona mengusulkan untuk menangguhkan hasil Referendum kemerdekaan Catalunya (Jones, 2017).Pengadilan Konstitusional telah menyatakan bahwa referendum yang dilakukan tidak sesuai dengan konstitusi Spanyol dan akan berakibat pada pelanggaran konstitusi negara.Carles Puigdemont bersama mitra koalisinya kembali mendeklarasikan kemerdekaan Catalunya pada 27 Oktober, namun Deklarasi ini tidak diakui oleh negara berdaulat manapun, termasuk Spanyol. Pemerintahan Catalunya menjadi tersebar, Puigdemont dan setengah dari menteri di Catalunya pergi ke pengasingan di Brussel, Belgia. Oriol Junqueras sendiri menyerahkan diri kepada pemerintah Spanyol dan ditahan di penjara hingga Juni 2021 (Tara, 2017).

Spanyol mengambil kendali langsung atas pemerintahan Catalunya. Tidak ada panggilan untuk melawan dari otoritas Catalan. Beberapa pejabat pro-kemerdekaan kehilangan pekerjaan, tetapi banyak tokoh tinggi pemerintah pro-kemerdekaan sebelumnya mempertahankan posisinya dan aktif bekerja sama dengan Madrid. Pere Aragonès, seorang politisi pro-kemerdekaan yang kini menjadi presiden Catalunya, menghabiskan periode ini sebagai wakil presiden dan Menteri Ekonomi dan Keuangan (Vila, 2022).

Berkaca dari ditangguhkannya hasil dari referendum kemerdekaan Catalunya, referendum ini pada dasarnya ilegal. Dan telah melanggar Konstitusi Spanyol tahun 1978. Namun di lain sisi Hukum Internasional melihat bahwa Catalunya dapat memisahkan diri dan membentuk suatu negara secara independen atas dasar penuntutan hak untuk menentukan nasib sendiri yang tercantum pada

pasal I dan II *International Covenant on Civil and Political Rights* dan Pemenuhan semua unsur pembentukan negara yang terdapat pada Konvensi Montevideo 1933 untuk memisahkan diri dan membentuk suatu negara, namun terhalang oleh Konstitusi Spanyol yang tidak mengakui akan hak menentukan nasib sendiri (*The Rights of Self Determination*). Kegagalan Catalunya dalam meraih kemerdekaan melalui penentuan nasib sendiri masih menjadi perdebatan yang tidak menemui ujung, dan meninggalkan rakyat Catalunya dengan harapan semata.

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, terdapat ketertarikan untuk menganalisis kegagalan referendum Catalunya dalam menerapkan prinsip *Rights Of Self Determination* terhadap Spanyol ditinjau dari Perspektif Hukum Internasional dengan mengambil judul : **“ANALISIS TERHADAP KEGAGALAN REFERENDUM CATALUNYA (*The Rights of Self Determination*) TERHADAP SPANYOL DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL DAN KONSTITUSI SPANYOL 1978”**.

1.2 IDENTIFIKASI MASALAH

Dari beberapa uraian yang dikembangkan pada latar belakang, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut :

1. Gerakan kemerdekaan Catalunya terhadap Spanyol untuk memisahkan diri sendiri melalui referendum yang digagalkan oleh Pemerintah Spanyol.
2. Catalunya menginginkan Otonomi yang lebih besar dan menginginkan negara berbentuk republik.
3. Catalunya menuduh sistem kebijakan fiskal yang berlaku di Spanyol hanya akan menghambat pertumbuhan wilayah Catalunya.

4. Konstitusi Spanyol sebagai tatanan hukum Spanyol yang menjadi hambatan dari Catalunya untuk memisahkan diri.

1.3 PEMBATASAN MASALAH

Penulisan karya tulis yang bersifat ilmiah perlu ditegaskan mengenai materi yang diatur di dalamnya. Hal ini sangat diperlukan untuk menghindari agar isi atau materi yang telah dirumuskan sehingga dengan demikian dapat diuraikan secara sistematis. Untuk menghindari pembahasan menyimpang dari pokok permasalahan, diberikan batasan-batasan mengenai ruang lingkup yang akan dibahas. Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan di atas, adapun ruang lingkup masalah yang akan dibahas yaitu, melakukan pembatasan batas permasalahan terhadap kegagalan Referendum Catalunya atas Spanyol.

1.4 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, adapun rumusan masalah yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

1. Apa yang menyebabkan Catalunya ingin memisahkan diri terhadap Spanyol ?
2. Bagaimana pandangan Hukum Internasional dan Konstitusi Spanyol 1978 terhadap kegagalan referendum penentuan nasib sendiri Catalunya ?

1.5 TUJUAN PENELITIAN

Penelitian terkait Analisis Terhadap Kegagalan Referendum Catalunya (*Self determination*) Terhadap Spanyol Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional mempunyai tujuan sebagai berikut:

a Tujuan Umum

Dalam penelitian ini yang menjadi tujuan umum penelitian adalah untuk mengetahui, menganalisis, dan mengkaji terkait kegagalan referendum

Catalunya terhadap Spanyol ditinjau dari perspektif hukum internasional dan konstitusi Spanyol 1978

b. Tujuan Khusus

- a) Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis terkait penyebab Catalunya ingin memisahkan diri dari Spanyol kegagalan referendum pemisahan diri yang dilakukan Catalunya terhadap Spanyol dari perspektif Hukum Internasional.
- b) Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis terkait pandangan Hukum Internasional dan Konstitusi Spanyol terhadap kegagalan dari referendum penentuan nasib sendiri Catalunya.

1.6 MANFAAT PENELITIAN

a Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai alur kegagalan pemisahan wilayah Catalunya dari negara induk Spanyol melalui tinjauan hukum internasional. Selain itu juga dapat memberikan acuan serta referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya mengenai kegagalan percobaan Penentuan hak Nasib Sendiri (*Rights of Self Determination*) yang dilakukan sebuah wilayah di dalam suatu negara. Selain itu juga diharapkan menjadi referensi tambahan guna pengembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum internasional mengenai pemisahan suatu wilayah dari suatu negara induk.

b Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca sebagai acuan dan sarana pengembangan pemikiran tentang faktor-faktor serta

penyebab gagalnya suatu referendum pemisahan diri suatu wilayah di dalam negara induk melalui hak penentuan nasib sendiri.

- b. Penelitian ini diharapkan menjadi manfaat bagi masyarakat luas dan negara sebagai suatu acuan serta referensi dalam menganalisa peristiwa serupa yang mungkin saja akan terjadi pada wilayah dari negara lain di masa yang akan datang mengenai hak penentuan nasib sendiri melalui suatu referendum.

